

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah organisasi atau entitas baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang memiliki tujuan sehingga diwujudkan dalam kinerja yang dicapainya. Kinerja sebuah organisasi dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan pada setiap periode tertentu. Indikator kinerja yang baik dilihat dan bisa terukur dengan jelas baik berdasarkan data yang dimiliki secara kuantitatif maupun secara deskriptif kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai semua tahapan kegiatan selesai. (Dally : 2010). Menurut Sawir (2003) dalam Antari (2016) Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh setiap perusahaan dan organisasi pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan dan organisasi untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.

Menurut Folland, dkk (2001) dalam Trisnantoro (2005:106), ukuran kinerja perusahaan dapat dilihat dari 2 aspek *for-profit* dan *non profit*. Dalam hal *for-profit* kinerja pada prinsipnya menyatakan bahwa tujuan badan usaha adalah menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan berusaha untuk mempunyai kemampuan yang cukup dalam mencapai tujuan sesuai dengan lingkungannya. Kinerja *non profit* berdasarkan teori ekonomi, *profit* merupakan indikator kinerja bagi sebuah lembaga usaha untuk berkembang. Pada dasarnya menganalisis kinerja keuangan dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Ross, dkk (2009) menganalisis kinerja keuangan untuk kegunaan internal adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan, seorang manajer akan dievaluasi terhadap kinerja keuangan dengan tujuan untuk diberi imbalan berdasarkan ukuran-ukuran akuntansi

dan kinerja seperti *margin* laba dan ekuitas. Secara *eksternal* analisis laporan keuangan berguna bagi pihak-pihak yang ada diluar perusahaan, termasuk kreditur jangka pendek maupun jangka panjang serta para calon investor. Adanya penilaian kinerja keuangan dapat memperoleh dasar yang objektif untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan prestasi yang diberikan kepada masing-masing karyawan. Dengan demikian diharapkan dapat memotivasi para karyawan untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan di perusahaan dengan menganalisis suatu laporan keuangan.

Menurut Husain (2014) laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa dan kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Rumah sakit milik pemerintah dalam 15 tahun terakhir mengacu pada tiga peraturan yang berbeda, sebelumnya pada tahun 2003 rumah sakit pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Pemerintah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia no. 156/Menkes/SK/I/2003 untuk mengatur kebijakan akuntansinya. Pada tahun 2010 rumah sakit milik pemerintah berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Oleh karena itu, dalam mengatur kebijakan akuntansinya BLU juga mengalami perubahan yaitu menggunakan SAK yang diterbitkan oleh IAPI dan SK Menkes No.1981/MENKES/SK/XII/2010 untuk mengatur kebijakan akuntansi keuangan dan menilai kinerja keuangan BLU bidang layanan kesehatan. Pada tahun

2014 Kementerian Keuangan Republik Indonesia menimbang bahwa perlunya pengaturan kembali pedoman penilaian kinerja badan layanan umum yang berkesinambungan, maka dari itu Kementerian keuangan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 34 Tahun 2014 sebagai pedoman penilaian kinerja BLU bidang layanan kesehatan agar kebijakan akuntansi BLU menjadi lebih baik lagi.

Rumah sakit sebagai organisasi yang bergerak dibidang kesehatan juga memerlukan suatu metode dan teknik untuk dapat mengetahui baik atau tidak kinerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan sangat diperlukan bagi rumah sakit guna melihat tingkat capaian tujuan rumah sakit. Salah satu contohnya adalah rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan kondisi keuangan serta kinerja keuangan BLU. Ada beberapa jenis rasio keuangan menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 34 tahun 2014 tentang pedoman penilaian kinerja BLU bidang layanan kesehatan. Rasio Kas, Rasio Lancar, Periode Penagihan Piutang, Perputaran Aset Tetap, Imbalan atas Aset Tetap, Imbalan Ekuitas, Perputaran Persediaan, Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional, Rasio Subsidi Biaya Pasien.

Kinerja keuangan termasuk organisasi kesehatan dalam mengelola keuangan seperti rumah sakit milik pemerintah dilihat dari laporan keuangan yang dibuat pada setiap tahunnya. Informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi akan kinerja, posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan pada perusahaan. Ini dapat berguna bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan sangat berguna bagi sebagian besar masyarakat dan penggunaanya bila dalam penyajian informasi laporan keuangan jelas dan mudah dipahami. Namun faktanya informasi didalam laporan keuangan tidak semua orang dapat memahaminya. Laporan keuangan adalah dokumen penting bagi manajemen untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Menurut Mahmudi (2016) laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bias lebih berkualitas. Dengan kata lain laporan keuangan merupakan hasil ringkasan data keuangan yang dibuat untuk kepentingan manajemen serta pihak lain yang memiliki kepentingan informasi keuangan tersebut. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 13, laporan keuangan BLU adalah bentuk pertanggung jawaban BLU yang disajikan dalam bentuk laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk menilai kinerja keuangan, laporan keuangan sebagai dokumen dasar dalam menilai kinerja keuangan rumah sakit adalah Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas pendanaan operasi, dan transitoris yang menggambarkan Saldo Awal, Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Saldo Akhir Kas selama eriode akuntansi. Laporan realisasi anggaran menyajikan alokasi, penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan serta ihktisar sumber. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari rician angka yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas.

Salah satu rumah sakit terbesar di kota Palembang adalah Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang yang memiliki kapasitas tempat tidur pasien sebanyak 969 unit. RSMH merupakan rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan RI dan merupakan Badan Layanan Umum Negara (BLUN). RSMH merupakan rumah sakit tipe A dan terakreditasi serta mempunyai visi menjadi rumah sakit pendidikan dan rujukan nasional berstandar internasional 2019. Oleh karena itu pada saat ini RSMH selalu berusaha memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat

dengan meningkatkan sarana dan prasarana antara lain membangun gedung baru yang akan diperuntukkan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Laporan keuangan RSMH Palembang merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh RSMH. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. RSMH pada tahun 2010 masih menggunakan SAK yang diterbitkan oleh IAPI dan SK Menkes No.1981/MENKES/SK/XII/2010. Pada tahun 2014 Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan pengaturan kembali pedoman penilaian kinerja BLU yang berkesinambungan. Dengan diterbitkannya peraturan baru pada tahun 2014 oleh Kementerian Keuangan, maka RSMH juga mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang pedoman penilaian kinerja BLU bidang layanan kesehatan untuk mengatur kebijakan akuntansinya.

RSMH menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dasar pengukuran yang diterapkan RSMH dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan saat ini RSMH mengacu pada PSAP 13 adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Analisis laporan keuangan mampu menyediakan banyak indikator penting yang berhubungan dengan kondisi baik atau tidaknya kinerja keuangan rumah sakit, sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dimaksudkan terutama bagi direktur utama sebagai pimpinan tertinggi rumah sakit untuk menetapkan kebijakan, serta membuat rencana dan kegiatan yang

lebih baik, agar tingkat capaian prestasi manajemen di bidang keuangan akan semakin membaik pada tahun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Rasio Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang diukur dengan rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan SAKPA menurut SK Menkes No.1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang pedoman akuntansi Badan Layanan Umum?
2. Bagaimana kinerja keuangan Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang diukur dengan rasio keuangan menurut peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 34 tahun 2014, tentang pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pada Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang diukur dengan rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan SAKPA menurut SK Menkes No.1981/MENKES/SK/XII/2010 dan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 34 tahun 2014?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan RSMH Palembang dengan cara menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan tersebut mengacu pada SAK menurut SK Menkes No.1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang pedoman akuntansi BLU dan peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 34 tahun 2014, tentang pedoman penilaian kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja keuangan Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang diukur dengan rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan SAKPA menurut SK Menkes No.1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang pedoman akuntansi Badan Layanan Umum.
2. Kinerja keuangan Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang diukur dengan rasio keuangan menurut peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 34 tahun 2014, tentang pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan.
3. Perbandingan kinerja keuangan pada Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang diukur dengan rasio keuangan berdasarkan SAK menurut SK Menkes No.1981/MENKES/SK/XII/2010 dan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 34 tahun 2014.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan peneliti tentang kinerja keuangan di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang yang diukur dengan rasio keuangan menggunakan SK Menkes No.1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang pedoman akuntansi Badan Layanan Umum.
2. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan peneliti tentang kinerja keuangan di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang yang diukur dengan rasio keuangan menggunakan peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan nomor 34 tahun 2014, tentang pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan.

3. Dapat mengetahui perbandingan kinerja keuangan di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang diukur dengan rasio keuangan SK Menkes No.1981/MENKES/SK/XII/2010 dan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 34 tahun 2014.
4. Dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi RSMH untuk memperbaiki kinerja keuangan dimasa yang akan datang.
5. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk kajian dengan topik yang sejenis.